

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena konflik dalam dunia politik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan tersebut, seperti dalam masyarakat, dalam partai politik, maupun aktor-aktor yang berada di dalam partai politik. Setiap individu ataupun setiap kelompok bersaing antara satu sama lain agar kepentingannya terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik, serta adanya tujuan yang saling bertentangan dalam hal ini aktor politik memerebutkan kursi kekuasaan. Konflik yang terjadi pun bisa kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja.

Konflik di dalam ranah perpolitikan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, konflik yang terjadi pun beraneka ragam. Salah satunya yang kerap terjadi di Indonesia adalah konflik-konflik internal di dalam partai politik. Kita ketahui konflik internal partai politik yang telah terjadi beberapa waktu lalu menimpa di partai-partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan sekarang konflik internal partai sedang terjadi di salah satu partai besar di Indonesia yaitu Partai Golongan Karya (selanjutnya dikenal dengan Golkar).

Partai politik yang merupakan wadah atau muara bertemunya banyak kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Usaha untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini terbukti karena banyak terjadinya perdebatan-perdebatan pendapat maupun perselisihan yang terjadi antar individu maupun antar kelompok yang berakibat terciptanya suatu konflik dalam partai politik.

Prestasi Partai Golkar selama mengikuti pemilu pun sangat baik dan menjadi salah satu partai politik di Indonesia yang diperhitungkan karena banyaknya dukungan masyarakat terhadap partai yang berlambangkan pohon beringin ini. Selanjutnya, dalam beberapa kali pemilihan umum dan di wilayah tertentu pun Partai Golkar sering memperoleh suara terbanyak dan mengungguli partai lainnya. Seperti hal ini termuat dalam situs wikipedia.org sebagai berikut:

“Pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer. Dalam pemilu 1997 Golkar memperoleh suara sebanyak 70,2%. Pada pemilu 1999 memperoleh suara 22% suara, ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58%. Partai Golkar mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%), perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini. Partai Golkar mendapat 91 kursi (16,3%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 18.432.312 (14,75%), perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.” (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia diakses pada tanggal 11 maret 2015)

Berdasarkan prestasi baik yang telah diraih Partai Golkar selama ini ternyata tidak menutup kemungkinan untuk partai tersebut terjerat konflik yang berdampak buruk terhadap perkembangan Partai Golkar sendiri. Baik berdampak dalam Partai Golkar sendiri, pandangan masyarakat maupun yang lainnya. Sekarang ini terjadinya konflik internal pun tidak dapat dielakan lagi oleh Partai Golkar dan konflik yang terjadi mengalami proses yang lama dalam penyelesaiannya.

Terselenggaranya dua Musyawarah Nasional (Munas) di dalam tubuh Partai Golkar. Munas yang satu berlangsung di Bali dan yang satu berlangsung di Jakarta. Munas Partai Golkar terjadi di tempat dan waktu yang berbeda serta memberikan hasil struktur kepengurusan yang berbeda. Hal tersebut merupakan hal yang membuktikan benar adanya perpecahan dan konflik internal di dalam Partai Golkar.

Perpecahan dan konflik internal Partai Golkar pun kian memuncak dan telah diketahui banyak publik akibat dari konflik yang terjadi semakin memanas dan menjadi salah satu topik hangat perbincangan publik. Pemberitaan tentang Partai Golkar pun selalu mewarnai media massa maupun media elektronik pada sekarang ini. Tentunya hal ini berakibat pada rusaknya citra dan membawa dampak yang buruk dalam perkembangan partai besar ini untuk ke depannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari harian *online* tribunnews.com edisi Jumat, 28 November 2014 pukul 01:59 WITA menyebutkan suatu berita yang berjudul Ternyata ini Penyebab Kisruh Munas Golkar :

“JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Suasana panas jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak muncul tiba-tiba. Kegerahan atas prestasi Aburizal Bakrie di Partai Golkar di Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 lalu, membuat sejumlah politisi partai berlambang Pohon Beringin mulai melakukan perlawanan secara senyap.

Saat itu, Politisi Partai Golkar melawan dengan menyatakan sikap atau pendapat berbeda. Bahkan, kritik pun dilayangkan di internal partai. Jelang Munas Partai Golkar, perlawanan kian menghangat.

Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyebut, kebekuan politik nasional dan kondisi Partai Golkar yang mengkhawatirkan menjadi pemicu perlawanan terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie. Agun bersama lima rekan di Partai Golkar menggalang pertemuan untuk menghentikan langkah Aburizal Bakrie.

"Saya salat istikharah terlebih dahulu. Dari situ saya mendapatkan tekad bulat untuk membenahi Golkar secara total. Karena yang salah bukanlah partai, tapi siapa yang memimpin," ujar Agun di Jakarta, Kamis (27/11/2014). Inisiasi melawan Aburizal bergayung sambut. Tujuh calon ketua umum Golkar menyokong inisiasi Agun. Apalagi, pertemuan di BimaSena Club, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta pada Kamis (30/10/2014), dipatahkan kubu Aburizal.

Sebelumnya, Agus Gumiwang, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, dan Airlangga Hartarto menyepakati pelaksanaan Munas Golkar pada Januari 2015. Kesepakatan itu diharapkan mampu meredakan konflik internal yang menghendaki Munas Golkar digelar tahun 2014. Kesepakatan itu mentah setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Hotel Meliapurosani, Yogyakarta memutuskan Rapimnas dilaksanakan pada 30 November 2014.

Konflik semakin meruncing setelah berhembus kabar Aburizal Bakrie akan memenangkan Munas Partai Golkar secara aklamasi. Skenario memenangkan Aburizal dilakukan di Pulau Dewata.”

(<http://nasional.inilah.com/read/detail/2093525/ical-dinilai->

penyebab-kisruh-internal-golkar di akses pada tanggal 27 Februari 2015)

Selain informasi tersebut, informasi lain diperoleh dari surat kabar harian Lampung Post Rabu, 4 Maret 2015 halaman 1 menyebutkan suatu berita yang berjudul MPG Sahkan Kubu Agung

“Makhamah Partai Golkar (MPG) mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pimpinan Golkar. Selain putusan itu, kepengurusan hasil Munas Ancol juga diminta merehabilitasi kader-kader yang dipecat dari putusan yang lalu, kemudian melakukan konsolidasi *bottom-up* mulai dari kabupaten/kota, musda provinsi, hingga Munas 2016.

Dalam amar putusan itu, terdapat *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) dari empat hakim yang menyidangkan permohonan tersebut. Amar putusan terbelah antara Ketua MPG Muladi dan anggota MPG HAS Natabaya dengan anggota MPG Andi Matalatta dan anggota MPG Djasri Marin.

Terdapat pendapat yang berbeda di antara anggota Majelis Makhamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, “ujar Muladi, saat membacakan amar putusan dalam sidang MPG, di kantor DPP Golkar, Selasa (3/3)

Adapun Muladi dan Natabaya menyampaikan adanya kasasi yang diajukan kubu Ical, maka mereka berpendapat kubu Ical telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui MPG. Karena itu, kedua majelis memberikan empat rekomendasi. “Menghindari bahwa yang menang mengambil semuanya, rehabilitasi yang dipecat, apresiasi yang kalah dalam kepengurusan, yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru,” kata Muladi.

Sementara itu pendapat lainnya dibacakan Djasri Marin. “Mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung,”ujarnya.

Konflik Partai Golkar tersebut terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang dimana Dewan Pimpinan Pusat merupakan acuan bagi dewan pengurus partai yang berada di daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Adanya konflik seperti pemberitaan tersebut tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap ranah perpolitikan di Indonesia terutama untuk Partai Golkar yang berada di daerah Provinsi maupun yang berada di

daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Bagaimana pun kepengurusan yang ada di bawah kepengurusan pusat akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat, terlebih konflik Partai Golkar mengalami proses yang lama.

Penyebaran Partai Golkar pun merata ke seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki partisipasi politik yang banyak dari masyarakat oleh sebab itu perkembangan Partai Golkar di Provinsi Lampung cukup pesat selain itu perkembangan yang pesat juga di dukung dengan posisi Lampung merupakan Provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera. Provinsi yang menjadi pintu gerbang untuk Pulau Sumatera. Tentunya hal ini mempermudah untuk keluar masuknya informasi atau yang lainnya.

Mengingat konflik yang disebabkan oleh Abu Rizal dan Agung Laksono yang berakibat terhadap perpecahan, serta Provinsi Lampung berada di posisi yang strategis. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap Partai Golkar yang ada di Provinsi Lampung, baik dalam menjalankan kegiatan program kerja, pengambilan keputusan, struktur keorganisasian maupun pemicu untuk timbulnya konflik partai Golkar yang ada di Provinsi Lampung.

Implikasi atau dampak dari konflik yang terjadi tentunya sangat besar untuk Partai Golkar itu sendiri. Baik dalam hal menjalankan kegiatan internal maupun eksternal partai. Bahkan dampak dari konflik tersebut akan merambat terhadap kinerja maupun kepengurusan yang ada daerah-daerah,

serta tidak menutup kemungkinan timbul konflik dan perpecahan yang dibawa dari pusat terhadap kepengurusan daerah.

Surat Kabar harian *online* pelitanusantara.com Selasa, 17 Februari 2015.

07:53 WIB menyebutkan suatu berita yang berjudul Lampung Punya Cerita

Heru dan Tony Ribut Sendiri:

”**BANDARLAMPUNG**-Perang dingin antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Kota Bandarlampung II Tony Eka Candra dengan Plt DPD I Partai Golkar (PG) Lampung versi Agung Laksono kian memanas. Hal ini lantaran keduanya saling tuding keabsahan terkait penunjukan Heru Sambodo sebagai Plt DPD I.

Plt DPD I PG Lampung, Heru Sambodo menegaskan dirinya kantungi Surat Keputusan (SK) asli atas penunjukan dirinya selaku plt gantikan Alzier Dianis Thabrani. "SK saya asli, silahkan saja kalau ada yang beranggapan begitu. Kalau Pak Tony jelas ngomong begitu," tukasnya, saat dikonfirmasi melalui via handphone, Rabu (11/2).

Saat disinggung mengenai Agung Laksono bukan sebagai ketua partai yang sah, Heru justru meminta Tony untuk membaca kembali hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. "Suruh dia pelajari hasil keputusan pengadilan. Suruh dia belajar, itu perintah pengadilan Jakarta Pusat (Jakpus) dan sesuai UU No 2 thn 2011 tentang parpol sama keputusan Menkum Ham. Sekarang saya tanya dia punya tidak putusan Menkumham? Sudah baca belum? Jadi dia itu yang dagelan," pungkasnya.

Heru pun tantang Tony bilamana kisruh ini kembali ke mahkamah partai dan mahkamah partai memenangkan Munas Ancol. "Gimana? Masih dagelan tidak? Itu putusan pengadilan dia berani melawan keputusan pengadilan tidak? Kalau dia berani melawan keputusan pengadilan suruh dia buat pernyataan," tantangnya.

Diketahui, kubu Agung Laksono telah menggugat pengurus kubu Aburizal Bakrie melalui Pengadilan Negeri Jakpus. Gugatan tersebut bernomor 579/PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014. Gugatan itu ditujukan kepada Aburizal Bakrie (tergugat I), Idrus Marham (tergugat II), Fadel Muhammad (tergugat III), Nurdin Halid (tergugat IV) dan Ahmadi Noor Supit (tergugat V) di PN Jakpus.

Dalam putusannya, PN Jakpus menyatakan bahwa gugatan kubu Agung Laksono niet onvankeljik atau tidak dapat diterima karena alasan prosedural yang belum dilakukan.”

(http://pelitanusantara.com/news/2015/02/17_Lampung_Punya_Cerita.html di

akses pada tanggal 1 Maret 2015).

Ternyata dari pemberitaan yang ada baik dalam pemberitaan media massa maupun yang ada dalam pemberitaan media elektronik, memberikan bukti bahwa sangat erat sekali kaitannya antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal yang membuktikan bahwa kaitan erat antara DPP dan DPD yaitu konflik yang berada di atas dapat memicu dan merambat ke bawah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian di DPD Partai GOLKAR Lampung mengenai konflik internal yang terjadi. Peneliti akan melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung dengan judul penelitian “Implikasi Konflik Internal Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implikasi konflik internal Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi Konflik Internal Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari konflik internal Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk Pengurus Partai Golongan Karya di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung kedepannya, sehingga untuk kedepannya Partai Golongan Karya dapat membatasi agar tidak terjadi konflik yang dapat merugikan.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau sudut pandang baru mengenai implikasi konflik internal partai, selain itu dapat dijadikan sebagai tambahan literatur penunjang pembelajaran mata kuliah yang berkaitan dengan implikasi konflik internal partai maupun penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.